



**Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Sekretariat Tim Kerja Konektivitas MP3EI

**KLIPING
BERITA MEDIA CETAK
TIM KERJA KONEKTIVITAS**

HARI JUM'AT, 1 FEBRUARI 2013



DAFTAR ISI

CPO	1-2
Infrastruktur Jalan	3
Migas	4
Distribusi Gas	5
Air Bersih	6
Bujet Infrastruktur	7



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Halaman:

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

2013

Kompas

Republika

Rakyat Merdeka

Suara Karya

Media Indonesia

Sinar Harapan

Seputar Indonesia

Neraca

Koran Tempo

Suara Pembaruan

Investor Daily

Jurnal Nasional

Bisnis Indonesia

Pikiran Rakyat

Kontan

Indopos

Lain-lain,

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
CPO Kian Sulit Bersaing	<div><div>- Penetapan bea keluar minyak sawit mentah sebesar 9 persen pada bulan Februari ini menjadi tantangan serius bagi pelaku bisnis minyak sawit mentah</div><div>- Indonesia tidak akan mengikuti langkah Malaysia. Pemerintah akan tetap konsisten dengan sistem penetapan bea keluar CPO. Hal itu dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan industri hilir CPO</div></div>					Hilirisasi bisa dilakukan dengan memberikan insentif keringanan pajak bagi produksi turunan CPO tanpa harus memberi beban bea keluar bagi ekspor CPO / turunannya.

CPO Kian Sulit Bersaing

Bea Keluar 9 Persen untuk Bulan Februari

JAKARTA, KOMPAS – Penetapan bea keluar minyak sawit mentah sebesar 9 persen pada bulan Februari ini menjadi tantangan serius bagi pelaku bisnis minyak sawit mentah. Bea keluar tersebut lebih tinggi dibandingkan bea keluar pada bulan Januari yang dipatok 7,5 persen.

Ini tantangan serius bagi pelaku bisnis CPO karena sejak Januari lalu Malaysia menetapkan bea keluar nol persen, yang berlanjut hingga Februari 2013.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Joko Supriyono di Jakarta, Kamis (31/1), mengatakan, dengan bea keluar yang lebih tinggi, minyak sawit mentah (CPO) Indonesia kian sulit bersaing di pasar global. Pasar cenderung membeli CPO Malaysia karena harganya murah.

Dia mengatakan, pihaknya sudah mengajukan permohonan ke pada pemerintah agar bea keluar diturunkan seperti Malaysia, tetapi tidak direspons. Pemerintah tetap menggunakan sistem bea keluar progresif berdasarkan harga acuan. "Daya saing CPO kita terus merosot tanpa intervensi pemerintah," ujarnya.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bahrul Chairi mengatakan, penetapan harga patokan ekspor CPO didasarkan pada harga referensi CPO, yakni 815,12 dollar AS per metrik ton (MT) untuk Februari. Angka itu naik 4,5 persen dari periode bulan sebelumnya, yaitu 780,26 dollar AS per MT. Karena itu, didapat harga penetapan ekspor CPO sebesar 744 dollar AS per MT, atau naik 5 persen dari periode bulan sebelumnya yaitu 709 dollar AS per MT.

Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi menegaskan, Indonesia tidak akan mengikuti langkah Malaysia. Pemerintah akan tetap konsisten dengan sistem penetapan bea keluar CPO. Hal itu dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan industri hilir CPO. Hilirisasi CPO di dalam negeri terus menunjukkan peningkatan, dengan perubahan komposisi ekspor.

Selama periode Januari-Oktober 2012 pangsa volume ekspor CPO mencapai 33,8 persen dan produk turunan CPO mencapai 66,2 persen. Sementara pangsa nilai ekspor CPO sebesar 33,2 persen dan pangsa nilai produk turunan CPO 66,8 persen.

Menurut anggota Komite Ekonomi Nasional, Hermanto Siregar, penerapan bea keluar yang tinggi justru akan menyurutkan investor masuk ke industri hilir CPO. Hilirisasi bisa dilakukan dengan memberikan insentif keringanan pajak bagi produksi turunan CPO tanpa harus memberi beban bea keluar bagi ekspor CPO atau turunannya. (ENY)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JanFebMarAprMeiJunJulAgtSepOktNovDes

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☐ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☒ Kontan

☐ Lain-lain,

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Ekspor CPO ke Pakistan Bisa Melejit	<div>- Ekspor minyak sawit mentah Indonesia ke Pakistan berpotensi melejit, ini lantaran berlakunya perjanjian perdagangan di bidang tertentu alias preferential trade agreement (PTA) antara Indonesia-Pakistan sejak 19 Januari 2013.</div> <div>- Gapki berharap ekspor CPO ke Pakistan bisa mencapai 1,5 juta ton</div>	2013				Namun, meski tariff sudah sama, Gapki masih masih mengkhawatirkan soal tariff di dalam negeri. Pasalnya, bea keluar CPO Indonesia masih dirasa terlalu tinggi bila dibandingkan Malaysia

Ekspor CPO ke Pakistan Bisa Melejit

JAKARTA. Ekspor minyak sawit mentah alias *crude palm oil* (CPO) Indonesia ke Pakistan berpotensi melejit. Ini lantaran berlakunya perjanjian perdagangan di bidang tertentu alias *preferential trade agreement* (PTA) antara Indonesia-Pakistan sejak 19 Januari 2013.

Direktur Jenderal (Dirjen) Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menjelaskan, dengan adanya PTA tersebut, tarif bea masuk produk ke Pakistan untuk ekspor dari Indonesia sekarang sama seperti tarif untuk ekspor Malaysia ke Pakistan.

Gapki berharap ekspor CPO ke Pakistan bisa mencapai 1,5 juta ton.

Asal tahu saja, selama ini ekspor CPO Indonesia ke Pakistan terkena pajak impor sebesar 15%, sedangkan Malaysia lebih murah, yakni 5%. Nah, dengan persamaan tarif saat ini, CPO Indonesia memiliki peluang yang sama. Selama ini pasar ekspor CPO Pakistan dikuasai Malaysia.

Malaysia memang sudah lebih dulu memberlakukan PTA dengan Pakistan. Tak heran, Malaysia mendapat diskon harga, sehingga lebih kompetitif dibandingkan Indonesia.

Sahat Sinaga, Ketua Umum Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI) memproyeksi, dengan kesi-

Indonesia ke Pakistan bakal naik lebih dari dua kali lipat pada tahun ini.

Hingga akhir tahun lalu, ekspor CPO Indonesia ke Pakistan hanya 450.000 ton. Dengan PTA, Sahat memperkirakan, kinerja ekspor bisa melonjak hingga 1,2 juta ton.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Joko Supriyono mengamininya. Dia berharap, tahun ini, ekspor CPO Indonesia ke Pakistan dapat mencapai 1,5 juta ton, atau setidaknya sama seperti volume ekspor Indonesia ke Pakistan, sebelum Malaysia bekerjasama dengan Pakistan.

Berdasarkan hitungan Gapki, ekspor CPO Indonesia ke Pakistan pada 2006 mencapai 1 juta ton. Namun, pada 2011, ekspor CPO Indonesia anjlok menjadi 700.000 ton.

Namun, meski tarif sudah sama, Gapki masih mengkhawatirkan soal tarif di dalam negeri. Pasalnya, bea keluar (BK) CPO Indonesia masih dirasa terlalu tinggi bila dibandingkan Malaysia.

Per Februari 2013, BK CPO Indonesia sebesar 9%, atau lebih tinggi dari Januari yaitu 7,5%. Padahal, pada Februari nanti, Malaysia akan menerapkan bea keluar nol persen.

Sekadar gambaran, dalam PTA tersebut, Indonesia menawarkan akses pasar dengan 216 pos tarif preferensi seperti buah segar, benang, dan bahan katun pakaian jadi. Sementara, Pakistan menawarkan akses pasar ke Indonesia dengan total 287 pos tarif preferensi, termasuk produk minyak kelapa sawit yang dapat dikonsumsi seperti CPO.



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JanFebMarAprMeiJunJulAgtSepOktNovDes

2013

☒ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☐ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☐ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Warga Tuntut Jalan Diaspal	<div>- Warga perbatasan Indonesia dan Malaysia di Aruk, kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan barat, menuntut janji pemerintah mengangun serta memperbaiki jalan penghubung kota Sambas dengan Aruk.</div> <div>- Dua tahun sejak pelayanan Lintas Batas Aruk ini diresmikan seharusnya jalan aspal dari kota Sambas ke Aruk sejauh 88 kilometer sudah diaspalkan agar warga ke dan dari kota Sambas</div> <div>- Kondisi ini bertolak belakang dengan Kampung Biawak di Malaysia. Di sana, kondisi jalan sangat mulus hinggal di Lundu</div>	2013	2020	Rp. 41,17 Triliun	PT. Jakarta Tollroad Development	Dimulai Konstruksi pertengahan 2013

Warga Tuntut Jalan Diaspal

Pemerintah Dinilai Tinggalkan Warga Perbatasan Kalbar-Malaysia

SAMBAS, KOMPAS – Warga perbatasan Indonesia dan Malaysia di Aruk, Kecamatan Sajingan Besar, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, menuntut janji pemerintah membangun serta memperbaiki jalan penghubung kota Sambas dengan Aruk. Apalagi, sudah beroperasi pos pelayanan lintas batas.

"Dua tahun sejak Pos Pelayanan Lintas Batas Aruk ini diresmikan seharusnya jalan aspal dari kota Sambas ke Aruk sejauh 88 kilometer sudah diaspalkan agar warga mudah ke dan dari kota Sambas. Namun, sampai saat ini jalan itu belum diperbaiki. Sebab itu, warga lebih memilih

berbelanja kebutuhan pokok ke Malaysia daripada ke Sambas," kata Sekretaris Desa Seibunga Subot kepada *Kompas* yang bersama Kemitraan mengunjungi Dusun Aruk, Kamis (31/1). Aruk adalah salah satu dusun di Desa Seibunga yang berbatasan langsung dengan Kampung

Biawak di daerah Lundu, Sarawak, Malaysia. Kemitraan ialah lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pemberdayaan masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Peduli. Jalan beraspal itu baru sekitar 6 km, yaitu menjelang masuk Aruk. Sebagian belum diaspal. Selebihnya masih rusak dan berlubang. Beberapa jembatan kayu juga rusak sehingga kendaraan harus berhati-hati melintasinya agar tidak terperosok ke sungai. Pada 2010, sejumlah menteri, seperti Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Helmy Faishal Zaini dan Menteri Tenaga Kerja

dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, datang ke Aruk. Mereka menjanjikan perbaikan ekonomi dan kesejahteraan di Aruk, antara lain membangun infrastruktur jalan dan jembatan. Kondisi ini bertolak belakang dengan Kampung Biawak di Malaysia. Di sana, kondisi jalan sangat mulus hingga di Lundu. Rufinus, tokoh masyarakat, menepis jika warga di Aruk tertinggal. "Kami ini bukan tertinggal, melainkan ditinggalkan. Pemerintah di Jakarta dan Provinsi Kalimantan Barat kurang memperhatikan dan memedulikan nasib kami," ujarnya. Ade Siti Barokah dari Kemit-

raan menyatakan, pihaknya akan menjembatani kebutuhan warga terpencil di sejumlah daerah, termasuk di Dusun Aruk, dengan pemerintah untuk membangun infrastruktur dan pengembangan ekonomi melalui sejumlah program pemberdayaan masyarakat. "Namun, hingga kini kami masih melakukan penilaian atas persoalan Dusun Aruk," katanya. Ribuan nelayan dan operator angkutan sungai di Kalbar sudah berbulan-bulan masih sulit mendapatkan solar subsidi. Mereka terpaksa beli solar di kios pengecer dengan harga sekitar Rp 7000 per liter agar bisa beraktivitas. (HAR/AHA)



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Halaman:

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JanFebMarAprMeiJunJulAgtSepOktNovDes

2013

☐ Kompas

☒ Republika

☐ Rakyat Merdeka

☐ Suara Karya

☐ Media Indonesia

☐ Sinar Harapan

☐ Seputar Indonesia

☐ Neraca

☐ Koran Tempo

☐ Suara Pembaruan

☐ Investor Daily

☐ Jurnal Nasional

☐ Bisnis Indonesia

☐ Pikiran Rakyat

☐ Kontan

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Blok Mahakam Diputus Tahun Ini	<div>- Pemerintah segera mengumumkan pemilik baru Blok Mahakam.</div> <div>- Saati ini, 80% produksi minyak dan gas nasional dihasilkan oleh kontraktor asing. Pertamina hanya berkontribusi 17% atau sekitar 180 ribu barel per hari</div> <div>- Mahakam dioperatori Total sejak 1967. Kontrak diperpanjang lagi dari 1997 berakhir maret 2017. Dari Mahakam, setidaknya Total mendapat pendapatan sebesar 989 miliar dolar AS</div>					

Blok Mahakam Diputus Tahun Ini

■ Sefti Oktarianisa

Pertamina dipastikan akan berpartisipasi dalam pengelolaan Blok Mahakam.

JAKARTA — Pemerintah segera mengumumkan pemilik baru Blok Mahakam. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik berujar akan menandatangani perjanjian baru operator blok gas di Kalimantan Timur itu pada 2013 ini. “Harus tahun ini,” ujar Menteri ESDM Jero Wacik menjawab *Republika*, Kamis (31/1). Menurutnya, Mahakam merupakan proyek migas besar yang menjadi prioritas. Sehingga, pihaknya harus bekerja cepat untuk memutuskan kepemilikan ladang migas tersebut. Ditambahkannya, saat ini rapat dan finalisasi dokumen sedang dilakukan.

Komitmen serupa juga dikatakan Dirjen Migas Kementerian ESDM A Edy Hermantoro. Dia menyatakan, kemungkinan besar konsorsium akan dibuat untuk mengelola blok tersebut. Edy pun memastikan, Pertamina akan masuk ke dalam blok yang kini dioperatori perusahaan asal Prancis, Total E&P Indonesia, hingga 2017 itu.

Namun, apakah Total tergabung dalam konsorsium? Ia mengatakan, belum ada keputusan. “Kita harus bahas juga apakah antarkonsorsium ini komersialnya sudah cocok atau belum,” katanya. Terkait keinginan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk berpartisipasi sebesar 10 persen pada blok tersebut, ia pun meng-

Produksi Minyak dan Gas Nasional



aku opsi itu masih dibahas.

Soal produksi, Edy menjamin kapasitas produksi gas Mahakam tetap terjaga. Dari 2010, ia mengaku, Total sudah berkomitmen untuk mengeksplorasi lapangan baru. Total juga sudah menjanjikan keuntungan hingga 10 sampai 11 miliar dolar AS dari lapangan baru itu. Pemerintah pun telah menghitung penurunan aset Blok Mahakam hingga 2017. Menurutnya, penurunannya tidak signifikan.

Direktur Utama Pertamina Karen Agustian menyatakan, sedang menunggu panggilan pemerintah untuk memaparkan kesiapan perseroan mengelola Mahakam. “Saya berharap nanti ada konsolidasi ke dalam dan pemerintah ada waktu untuk memanggil kami.”

Saat ini, 80 persen produksi minyak dan gas nasional dihasilkan oleh kontraktor asing. Pertamina hanya berkontribusi 17 persen atau sekitar 180 ribu barel per hari (bph). Dengan beralihnya Mahakam ke Pertamina, sejumlah kalangan per-

caya BUMN ini akan mampu menggenjot produksi migasnya.

Anggota Komisi VII DPR Chandra Tirta Wijaya mendukung pengambilalihan Blok Mahakam oleh Pertamina. Menurutnya, Pertamina mampu untuk mengelola blok tersebut secara finansial maupun teknis. Lagi pula, potensi gas Mahakam amat besar, tak mungkin tidak menguntungkan.

Ditambahkannya, sudah terlalu lama Mahakam dikuasai asing. Penguasaan Total dan Inpex di Mahakam sudah hampir 50 tahun. Oleh karena itu, ia berharap Kementerian ESDM bisa memutuskan persoalan ini pada 2013. Ia khawatir bila mundur ke 2014, Mahakam akan dipolitisasi menjelang pemilihan umum presiden.

Sementara itu, pengamat migas Kurtubi curiga, lambannya pengalihan Blok Mahakam ke Pertamina disebabkan oleh permainan pihak-pihak tertentu yang ingin menjegal Pertamina. Bahkan, menurutnya, terdapat skenario yang ingin memperpanjang keberadaan Total di Mahakam yang berujung pada kerugian negara.

Mahakam dioperatori Total sejak 1967. Kontrak diperpanjang lagi ke operator yang sama dari 1997 dan berakhir pada Maret 2017. Dari Mahakam, setidaknya Total mendapat pendapatan sebesar 98 miliar dolar AS.

Sesuai UU Migas Nomor 22 Tahun 2001, operator boleh mengajukan perpanjangan dan negara boleh menolak permohonan tersebut. BUMN pun mempunyai hak yang sama dan bisa didahulukan untuk mendapat blok migas yang habis masa kontraknya. ■ *edifitria andayani*



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

2013

☐ Kompas

☐ Republika

☐ Rakyat Merdeka

☐ Suara Karya

☐ Media Indonesia

☐ Sinar Harapan

☐ Seputar Indonesia

☐ Neraca

☐ Koran Tempo

☐ Suara Pembaruan

☐ Investor Daily

☐ Jurnal Nasional

☐ Bisnis Indonesia

☐ Pikiran Rakyat

☒ Kontan

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Target Distribusi PGAS Tahun 2013 Naik 10%	<div>- Kenaikan target volume distribusi ditunjang oleh pertumbuhan industri gas di hulu.</div> <div>- Pemerataan distribusi gas di Indonesia masih akan terkendala ketersediaan infrastruktur serta kontrak jangka panjang ekspor ke luar negeri</div>				PT. Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGAS)	

TARGET KINERJA EMITEN

Target Distribusi PGAS Tahun 2013 Naik 10%

JAKARTA. Tahun ini, PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS) menargetkan volume distribusi gasnya naik antara 5%-10%. Hingga kuartal III-2012, distribusi gas PGAS tercatat 801 juta kaki kubik per hari (mmsefd).

Menurut *Corporate Communication* PGAS Ridha Ababil, distribusi gas hingga akhir tahun 2012 angkanya tidak jauh berbeda dengan kuartal III-2012. "Karena sudah dihitung rata-rata satu harinya," ujar Ridha, Selasa (29/1).

Kenaikan target volume distribusi itu, kata Ridha, ditunjang oleh pertumbuhan industri gas di hulu. Pasokan gas dari hulu terus bertambah, imbas dari tumbuhnya permintaan di sektor industri dan rumah tangga.

Meski demikian, secara umum pemerataan distribusi gas di Indonesia masih akan terkendala oleh ketersediaan infrastruktur serta kontrak jangka panjang ekspor ke luar negeri.

Oleh sebab itu, salah satu langkah yang akan ditempuh PGAS adalah mengembangkan infrastruktur. Kata Ridha, PGAS tahun ini mengalokasikan belanja modal (*capex*) US \$ 500 juta. Sekitar US\$ 300 juta akan PGAS gunakan untuk menambah jaringan distribusi dan penambahan pipa gas.

Asal tahu saja, saat ini, PGAS sudah menyelesaikan pencapaian konstruksi lebih dari 50% pipa proyek CP3B, Cikande-Bitung, sepanjang 30 km. Pipa gas itu akan mengalirkan gas ke jaringan distribusi di wilayah Banten Timur, melalui *offtake station* Bitung 2 dan Bitung 3. Rencananya, pembangunan jalur pipa proyek CP3B akan selesai Juli 2013.

Sementara, sisa dana *capex* sebesar US\$ 200 juta, akan PGAS alokasikan bagi pengembangan unit penampungan dan regasifikasi terapung (RSFU) di Lampung. Kapasitas pengeluaran gas dari fasilitas RSFU Lampung ini sebanyak 240 mmcfcd. FSRU Lampung akan memasok gas ke Lampung, Bojonegara (Banten), dan Bekasi. Kapasitas FSRU itu sendiri sekitar 1,5 juta-2 juta ton per tahun. Rencananya, pengembangan RSFU Lampung selesai tahun 2015.

Untuk membiayai belanja modal tahun ini, PGAS akan menutupnya dari kas internal perusahaan. Per September 2012 lalu, kas internal PGAS terbilang tambun sebanyak US\$ 1,29 miliar.

Kemarin, harga saham PGAS sama dengan hari sebelumnya di level Rp 4.675 per saham.

Agustinus Beo da Costa



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Des

2013

☐ Kompas

☐ Republika

☐ Rakyat Merdeka

☐ Suara Karya

☐ Media Indonesia

☐ Sinar Harapan

☐ Seputar Indonesia

☐ Neraca

☐ Koran Tempo

☐ Suara Pembaruan

☐ Investor Daily

☐ Jurnal Nasional

☐ Bisnis Indonesia

☐ Pikiran Rakyat

☒ Kontan

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Ketersediaan Air Bersih Belum Optimal	<div><div>- Ketersediaan air bersih di dalam negeri masih jauh dari target Millenium Development Goals (MDPGs). Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida Alisjahbana, menuturkan berdasarkan data terakhir, saat ini rata-rata cakupan air bersih di Indonesia hanya sekitar 50%</div><div>- Beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Sumber Daya Air di antara mengefektifkan Perpres No. 29 tahun 2009 tentang pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum</div></div>					

Ketersediaan Air Bersih Belum Optimal

JAKARTA. Ketersediaan air bersih di dalam negeri masih jauh dari target *millenium development goals* (MDGs). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Armida Alisjahbana, menuturkan berdasarkan data terakhir, saat ini rata-rata cakupan (*coverage*) air bersih di Indonesia hanya sekitar 55%.

Padahal, pada tahun 2015 nanti, berdasarkan target MDGs, cakupan fasilitas air bersih, air minum, termasuk pengolahan limbah dan sanitasi harus mencapai 68%. Artinya, masih ada 13% lagi yang harus dikejar dalam dua tahun terakhir. Makanya, pemerintah melalui Dewan Sumber Daya Air Nasional memberikan beberapa rekomendasi untuk

bisa mengejar pencapaian cakupan air bersih di Indonesia.

Deputi Sarana dan Prasarana Bappenas Dedy S Priatna menuturkan tren tahun 2011 hingga 2013 pertumbuhan cakupan air bersih rata-rata hanya 3% saja. Sehingga, memang perlu ada percepatan. Menurutnya, beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Sumber Daya Air di antara mengefektifkan Perpres No 29 tahun 2009 tentang pemberian jaminan dan subsidi bunga oleh pemerintah pusat dalam rangka percepatan penyediaan air minum. Selain itu, "Pemda bisa mengalokasikan dana yang lebih banyak untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah," ujarnya.

Herlina Kartika



Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
BAPPENAS

KLIPING BERITA MEDIA CETAK

Tim Kerja Konektivitas

Hal. Koran/Media:

Bagian:

Halaman:

POSITIF (+)

NETRAL

NEGATIF (+)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JanFebMarAprMeiJunJulAgtSepOktNovDes

2013

☐ Kompas

☐ Media Indonesia

☐ Koran Tempo

☐ Bisnis Indonesia

☐ Republika

☐ Sinar Harapan

☐ Suara Pembaruan

☐ Pikiran Rakyat

☐ Rakyat Merdeka

☐ Seputar Indonesia

☐ Investor Daily

☒ Kontan

☐ Suara Karya

☐ Neraca

☐ Jurnal Nasional

☐ Indopos

☐ Lain-lain,

.....

Jenis Berita	Topik Berita	Tahun mulai	Tahun selesai	Biaya	Pelaku	Keterangan
Alokasi Bujet Infrastruktur Bakal Naik Menjadi Rp. 300 triliun	<div>- Anggaran infrastruktur saat ini masih jauh dari angka ideal, idealnya menurut Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar bisa mencapai 5% dari PDB, artinya sekitar Rp. 460 triliun</div> <div>- Pemerintah getol menawarkan proyek kerjasama pemerintah dan swasta</div> <div>- Untuk tahun ini pemerintah menargetkan melakukan groundbreaking terhadap 82 proyek infrastruktur</div>					

■ ANGGARAN INFRASTRUKTUR

Alokasi Bujet Infrastruktur Bakal Naik Menjadi Rp 300 Triliun

JAKARTA. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ingin meninggalkan citra positif di akhir tahun dengan menggenjot realisasi proyek infrastruktur. Untuk melaksanakan keinginan ini, maka alokasi bujet infrastruktur tahun depan akan ditingkatkan menjadi Rp 250 triliun hingga Rp 300 triliun.

Janji penambahan anggaran infrastruktur ini disampaikan oleh Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar, Kamis (31/1). Saat ini, anggaran infrastruktur di bujet 2013 mencapai Rp 203,9 triliun. "Di APBN tahun 2014, akan kami tingkatkan hingga 50% dari alokasi bujet tahun ini," kata Mahendra, kemarin.

Memang anggaran infrastruktur saat ini masih jauh dari angka ideal. Sebab, anggaran infrastruktur yang ada tahun ini hanya sekitar 2,2% dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Idealnya, menurut Mahendra, bisa mencapai 5% dari PDB, artinya sekitar Rp 460 triliun.

Meski begitu, Mahendra masih berharap ada peran dari sektor swasta untuk ikut membangun infrastruktur di tanah air. Pemerintah pun getol menawarkan proyek kerjasama pemerintah dan swasta atawa *public private partnership* (PPP).

Dengan cara ini, swasta yang bekerjasama menggarap proyek pemerintah bisa men-

cari pendanaan dari masyarakat lewat menjual saham ke publik atau *initial public offering* (IPO). Swasta bisa juga menerbitkan surat utang untuk mengumpulkan dana masyarakat, atau langsung mencari pendanaan dari perbankan baik lokal maupun asing.

Nah untuk tahun ini, pemerintah menargetkan melakukan *groundbreaking* terhadap 82 proyek infrastruktur. Total nilai investasi terhadap seluruh proyek tersebut mencapai Rp 143,085 triliun. Kebanyakan proyek tersebut adalah jalan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, pengolahan air, gas, dan telekomunikasi.

Anna Suci Pertiwtasari